



Perumahan Muslim dan Politik Ruang di Yogyakarta

Oleh:

Kamil Alfi Arifin¹

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir hingga kini, telah banyak berdiri perumahan Muslim di Yogyakarta. Beberapa area yang meliputi wilayah di beberapa kabupaten seperti Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo telah menjadi target para developer. Pembangunan perumahan Muslim bukan semata-mata merupakan proyek berorientasi bisnis, melainkan juga didorong dan dipengaruhi oleh nilai-nilai ideologis dan agama. Kajian ini ditujukan untuk menganalisis produksi ruang yang berlangsung dalam pembangunan perumahan Muslim dan hubungan ekonomi-politik yang dapat dijumpai melalui kepentingan antara pihak developer dan elit kelompok-kelompok Islam yang terlibat dalam proses produksi spasial untuk perumahan Muslim tersebut. Lebih lanjut, kajian ini menunjukkan adanya suatu konspirasi yang juga melatarbelakangi proyek yang dikelola oleh pihak developer dan elit kelompok-kelompok Islam tertentu.

Kata kunci: *perumahan Muslim, produksi ruang, kepentingan ekonomi-politik, elit Muslim*

Abstract

In the last few years to date, lots of Muslim housings have been built in Yogyakarta. There are several areas of the new Muslim housing which covers the regencies such as Sleman, Bantul, Gunungkidul and Kulon Progo as the targets of several developers. The Muslim housing development is not merely a business-oriented project, rather this development is also driven and guided by ideological and religious values. The

study aims to analyze the space production of Muslim housing in Yogyakarta and the economic-political relationship which can be found in the interests between the developers and the Islamic groups' elites involved in the process of spatial production in the development of Muslim housings. Indeed, the study also shows that there is a conspiracy lies behind the project managed by the developers and the elites of particular Islamic groups.

Keywords: *Muslim housing, the production of space, Muslim elite*

Pendahuluan

Dalam waktu beberapa tahun terakhir sampai saat ini, di Yogyakarta dipenuhi dengan perumahan-perumahan berlabelkan agama. Terutama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perumahan muslim.² Merebaknya perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta memang merupakan fenomena empiris yang aktual, dan nampaknya, akan terus berlangsung selama beberapa tahun ke depan. Terbukti, jika menyempatkan diri berkeliling menyusuri pelbagai tempat di Yogyakarta atau cukup dengan hanya berselancar di dunia maya, tidak akan sulit untuk menemukan perumahan-perumahan muslim—baik yang sudah dibangun dan ditempati, atau masih baru ditawarkan dalam bentuk produk properti dalam brosur-brosur maupun situs-situs perumahan di internet.

¹ Kamil Alfi Arifin adalah alumnus Sekolah Pascasarjana Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Ide awal penelitian ini pernah diterbitkan di Majalah Basis, edisi Nomor 01-02, Tahun Ke 65, 2016.

Penulis melakukan pengamatan dan pemetaan awal kajian (preliminary research) terkait perumahan-perumahan muslim berdasarkan empat lingkup kabupaten yang ada di Yogyakarta. Tujuannya untuk menunjukkan fakta bahwa perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta memang merebak. Dari pengamatan dan pemetaan tersebut, didapatkan seluruh kabupaten di Yogyakarta (Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul) dijadikan lokus dari proyek penggarapan perumahan-perumahan muslim oleh para pengembang (*developer*). Di Bantul saja misalnya, untuk menyebut beberapa diantaranya, ada perumahan Muslim "*Sedayu*", perumahan Muslim "*Nirwana Residence*", perumahan Muslim "*Baitus Sakinah*", perumahan Muslim "*Madina Residence Yogyakarta*", perumahan Muslim "*Griya Baiturahman*" dan perumahan Muslim "*Puri Sakinah 2*". Di Kabupaten Sleman, ada perumahan Muslim "*Darussalam*", perumahan Muslim "*Djogja Village*", dan perumahan Muslim "*Villa Green Madani*". Sedangkan di Kulon Progo, ada perumahan Muslim "*Griya Nadhifa*". Sementara di Gunung Kidul, ada perumahan Muslim "*De Afifa Residence*", perumahan Muslim "*Rahmani Green Resident*", serta masih banyak yang lainnya.

Sulit untuk memastikan secara spesifik mengenai kapan sebenarnya perumahan-perumahan muslim tersebut muncul pertama kalinya di Yogyakarta. Hanya saja,

untuk memberikan penjelasan secara umum atas munculnya perumahan-perumahan muslim itu, barangkali perlu melihat kembali ke dalam konteks pada kisaran antara tahun 1970 sampai 1980an. Pada tahun 1970an, terdapat kondisi-kondisi yang mendorong program perumahan yang kemudian banyak diikuti oleh munculnya proyek-proyek perumahan yang dikelola oleh swasta. Kondisi-kondisi ini adalah konsekuensi logis dari kebijakan pembangunan nasional pemerintah yang memusatkan pada pertumbuhan dan pencapaian ekonomi (Siregar dalam Tjahjono, dkk, 2012: 131). Pertengahan tahun 1980an, deregulasi ekonomi³ juga semakin memberikan peluang yang cukup besar kepada swasta atau pengembang (*developer*) non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan. Lantas para pengembang kemudian mulai melakukan upaya-upaya akrobatik dengan inovasi-inovasi berbagai macam konsep perumahan yang dikembangkan untuk menarik minat dan perhatian para konsumen⁴. Misalnya, muncul konsep "perumahan hijau", yang tidak hanya menekankan pada kenyamanan dan kemegahan hunian semata, melainkan juga keasrian dan kesegaran alam. Tidak

³ Mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan deregulasi ekonomi ini, lebih lengkap silahkan lihat dalam CST Kansil "*Paket Kebijakan Deregulasi 1988*", Karya sastra Tridarma, Jakarta: 1989.

⁴ Lihat dan pelajari artikel Farabi Faqih "*Rumah 'Indonesia Indah'*" dalam situs www.karbonjournal.org.

hanya itu, para pengembang juga memasukkan konsep nilai-nilai agama (Islam) ke dalam persaingan bisnis properti perumahan. Dimasukkannya konsep agama ke dalam bisnis properti perumahan tersebut, diperkirakan mulai muncul pada sekitar tahun 1990an, terlebih di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya (Lasman, 2007: 2). Tak mengherankan, pada waktu itu, arus kesadaran Islam kultural dan politik minimal, tetapi dalam level dan tataran simbolik mengalami peningkatan yang pesat (Ibrahim dalam Latif, 2007). Islamisasi merebak di berbagai bidang dan aspek kehidupan di masyarakat (Ricklefs, 2012: 453; Turmudi, 2014: 6; Baso, 2002: 20). Menguatnya proses islamisasi ini, tak bisa dilepaskan dari konteks politik yang melingkupinya. Semua bermula dari sebuah pergeseran politik penguasa Orde Baru terhadap Islam. Jika sebelumnya, negara di bawah rezim Orde Baru menerapkan *political scape-goating* yang penuh kebencian terhadap Islam⁵. Namun, pada akhir tahun 1980an, penguasa mulai tampak merangkul hampir seluruh elemen umat Islam. Islam mulai diakomodasi oleh penguasa sejak saat itu. Pada awal tahun

1990an, akomodasi penguasa terhadap Islam berada pada titik puncaknya (Maliki, 2010: 298). William Liddle bahkan mencatat pergeseran politik ini sebagai *Islamic turn in Indonesia*⁶. Martin van Bruinessen menganggapnya sebagai pembalikan dramatis dari kebijakan-kebijakan Orde Baru sebelumnya (Bruinessen, 2013: 223). Robert Hefner menyebutnya sebagai *regimist Islam*⁷. Fachry Ali dalam pidato politik akhir tahunnya di LIPI pada tahun 1994 menyebutnya sebagai “institusionalisasi tidak resmi penyatuan Islam dan negara” (dalam Husaini, 1995: 90). Sebagian pengamat lain, menggambarkan fenomena ini sebagai era “bulan madu” antara Islam dan pemerintah (Afandi, 1997: 3). Islam mulai bangkit dari tiarap panjang, dari pengucilan struktural, dari keterpinggiran, dan mulai mendapatkan akses yang besar dalam pemerintahan serta memiliki keberanian mengartikulasikan identitasnya, kesadaran relijiusitasnya di ranah publik (Schmidt, 2012: 384; Assyaukanie, 2009: 177; Hasbullah, 2012: 49). Suatu hal yang sebelumnya betul-betul tak dapat dan mustahil dilakukan. Perumahan muslim merupakan salah satu wujud ekspresi dan

⁵ Mengenai hubungan yang sublim antara Islam dan negara, terutama bagaimana represi yang dilakukan negara terhadap Islam pada masa Orde Baru, bisa dilihat dalam Robert Pringle “*Understanding Islam in Indonesia: Politics and Diversity*” pada bagian “*The Suharto Era: Islam Repressed, Islam Resurgent*”, Singapore, EDM. Lihat juga dalam Noorhaidi Hasan “*Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*”, Jakarta, LP3ES dan KITLV, hal 45.

⁶ Untuk membaca lebih jauh analisa William Liddle, lihat artikelnya berjudul “*The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation*” dalam *The Journal of Asian Studies* No 3 Volume 55 tahun 1996.

⁷ Pemahaman lebih detail, lihat Robert Hefner, dalam “*Civic Islam: Muslim and Democratization in Indonesia*”, Princeton University Press, 2000, terutama bagian dalam hal 128-43.

artikulasi identitas Islam, khususnya setelah akomodasi identitas keislaman ini diwujudkan dalam produk-produk kultural yang dimanfaatkan seluas-luasnya oleh para kapitalis⁸ (*developer*/pengembang perumahan) untuk mereguk profit dan keuntungan-keuntungan material yang sebesar-besarnya.

Mencermati fenomena muncul dan merebaknya perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta, secara teoretis kita menemukan dua hal, apa yang oleh Ronald Lukens-Bull (dalam Kittiarso, 2008: 220) disebut sebagai *ideologization of commodities (religification of commodities)* dan *commoditization of ideologies*. Dua konsep yang mengacu pada proses-proses yang menyambungkan dan melekatkan (*embodiment*) nilai-nilai, ide-ide dan ideologi pada suatu komoditas, serta proses-proses yang menjadikan yang ideologi tersebut menjadi sekedar komoditas itu sendiri. Dalam konteks perumahan muslim, kita melihat bagaimana para pengembang (*developer*) memasukkan dan melekatkan konsep agama (Islam) ke dalam komoditas properti perumahan. Bagi para pengembang yang orientasinya

sekedar bisnis dan profit, tentu perumahan-perumahan muslim diproduksi karena menganggap prospek pasar yang bagus. Mengingat jumlah kelas menengah muslim⁹, termasuk di Yogyakarta, cukup besar. Meskipun dari pengamatan awal yang penulis lakukan, ada beberapa proyek perumahan muslim di Yogyakarta (untuk tidak mengatakan sebagian besar) yang dibangun bukan semata-mata karena tujuan mencari keuntungan material, melainkan juga digerakkan dan “dipandu” oleh hal-hal yang sifatnya ideologis-keagamaan, baik dari sisi pengembang sendiri maupun konseptor perumahan-perumahan muslim yang terlibat di Yogyakarta. Konseptor yang penulis maksud adalah orang-orang yang merumuskan konsep perumahan muslim dan membangun relasi kerja dengan pengembang dalam merealisasikan perumahan muslim yang dikonsepanya. Konseptor perumahan muslim ini, penulis sebut sebagai ‘elit kelompok Islam’. Disebut demikian, sebab konseptor mendaku membawa muatan “dakwah agama” dalam proses produksi perumahan muslim yang mereka lakukan. Pada titik ini, penulis menemukan adanya dominasi kekuatan

⁸ Menurut Yoshihara Kunio dalam bukunya yang cukup terkenal “*The rise of Ersatz capitalism in Southeast Asia*”, dalam negara-negara sedang berkembang, istilah “kapitalis” memiliki konotasi yang buruk dan negatif. Istilah ini kemudian diganti dengan istilah yang terdengar lebih netral seperti “elit bisnis” dan “wirausahawan”. Lihat Yoshihara Kunio, “*Kapitalisme Semu Asia Tenggara*”, diterjemahkan oleh A. Setiawan Abadi, LP3ES, Jakarta, 1990: 1

⁹ Menurut banyak ilmuwan sosial, seperti Hefner, Kuntowijoyo, Arif Budiman, dll, kelas menengah di Indonesia muncul secara fenomenal pada tahun 1980-1990-an, termasuk kelas menengah muslim di dalamnya. Yang menarik, dalam konteks Indonesia, kemunculan lapisan masyarakat baru ini nyaris bersamaan dengan meningkatnya semangat kembali pada agama. Lihat Moeflich Hasbullah dalam “*Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*”, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2014: 94-96.

kapitalis (*developer*/pengembang perumahan) dan elit kelompok Islam yang bersekongkol dalam memproduksi perumahan muslim di Yogyakarta.

Fenomena merebaknya perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta, bagi penulis, bukan hanya persoalan komodifikasi agamanya yang penting dikaji dan dipersoalkan. Yang tidak kalah menarik, juga persoalan tarik menarik kepentingan ideologis tertentu yang kemungkinan bermain di dalamnya. Mengingat representasi atas perumahan muslim merupakan sebuah ruang (sosial). Dalam teori-teori ruang yang dirumuskan beberapa ilmuwan sosial kritis, ruang selalu diyakini sebagai hasil dari konstruksi sosial, dari relasi-relasi sosial yang dinamis dan terus berubah dan selalu bertaut dengan pertanyaan seputar kekuasaan dan simbolisme (Shields, 2006: 148; Barker, 2008: 309). Ruang dengan manusia itu selalu berdialog (Ajidarma, 2008: 229). Bahkan bagi Henri Lefebvre, salah seorang teoretikus neo-Marxian terkemuka, ruang bukan hanya sekedar sesuatu yang dapat dikonsumsi semata, tetapi ruang juga dijadikan alat kekuasaan untuk meraih kendali atas ruang yang semakin besar oleh kelas-kelas yang berkuasa (Lefebvre, 1991: 26-27). Dalam praktik dominasi atas ruang, hampir selalu pasti akan selalu terjadi peminggiran. Berangkat dari argumentasi dan pemaparan yang cukup panjang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji; *pertama*,

bagaimana produksi ruang secara spasial dan secara sosial berlangsung dalam pembangunan perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta? *kedua*, bagaimana relasi dan kepentingan ekonomi politik dari pengembang dan elit kelompok Islam yang terlibat dalam pembangunan perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta tersebut?

Metodologi dan Kerangka Analisis 'Produksi Ruang'

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Audifax, salah satu karakteristik penting dari pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengkonstruksi makna budaya, dan nilainya yang mensyaratkan peneliti untuk "hadir" dan "terlibat". Berkebalikan dan kontras dengan pendekatan kuantitatif yang salah satu karakteristik utamanya adalah bertujuan untuk mengukur fakta objektif dan menekankan pada prinsip *bebas nilai* (Audifax, 2008: 57). Mekanisme kerja dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan, menginterpretasi dan menganalisis produksi ruang yang berlangsung dalam pembangunan perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta, serta menganalisis bagaimana relasi dan kepentingan ekonomi-politik dari pengembang dan elit kelompok Islam terlibat dalam proses tersebut.

Untuk memahami produksi ruang dalam mengkaji pembangunan perumahan-

perumahan muslim sebagai produk sosial, kajian ini bertolak dari tesis penting Henri Lefebvre terutama yang dijabarkan dalam karya magnum opusnya berjudul *"The Production of Space"*. Tesis penting Lefebvre dalam karya monumentalnya ini, adalah pandangannya yang menempatkan ruang sebagai produk sosial (Lefebvre, 1991: 22-27). Pemahaman mengenai ruang semacam ini memang agak berbeda, atau sama sekali lain, bila dibandingkan dengan pemahaman lama mengenai ruang. Jika dalam pemahaman konvensional, ruang selalu dianggap dan dibayangkan sebagai realitas material yang independen atau swadiri (*space in it self*). Menurut Lefebvre, malah sebaliknya, produksi ruang itu selalu terikat pada realitas sosial yang melingkupinya. Ruang tak pernah mampu mengadakan "dirinya sendiri" atau mewujudkan secara alamiah. Pemahaman mengenai produksi ruang seperti ini, bukan tidak memiliki konsekuensi, dengan kata lain, ruang itu bersifat "politis". Ya, ruang, kata Lefebvre, seringkali kemudian seperti alat berpikir dan bertindak. Ruang mampu mengarahkan orang untuk berpikir dan bertindak dalam hidup kesehariannya, karena ruang memang dimaksudkan untuk kepentingan kontrol dan dominasi. Ruang bukan sebuah "kotak" yang steril dan netral, melainkan, ia selalu merupakan sesuatu yang tak sederhana dan selalu bertaut erat dengan persoalan "kekuasaan".

Menurut Lefebvre, ruang sebagai produk sosial, diproduksi melalui *momen-momen produksi ruang*. Terkait hal ini, Lefebvre merujuk pada tiga konsep yang kerap disebut dengan konsep triadik/tripartit yaitu: praktik spasial (*spatial practice*), representasi ruang (*representation of space*) dan ruang representasional (*space of representational*) (Lefebvre, 1991: 38-39). Ketiganya ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait, tak dapat dipisahkan satu sama lain, dan bersifat determinan—digunakan Lefebvre untuk menjelaskan secara canggih bagaimana ruang diproduksi dan direproduksi secara terus menerus dalam keseharian (*everyday life*). Dengan menggunakan konsep triadik/tripartit Lefebvre, bagian ini berupaya melihat dan sekaligus menjawab bagaimana perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta tersebut diproduksi dan direproduksi.

Konsep praktik spasial (*spatial practice*) dalam kerangka berpikir Lefebvre merujuk pada dimensi berbagai praktik, aktivitas dan relasi sosial (Robet, 2014). Lefebvre menegaskan bahwa hanya melalui relasi sosio-historis dari sebuah dunia sosial, ruang itu dapat diproduksi. Bagi Lefebvre, praktik spasial juga dianggap sama dan tidak dibedakan dengan praktik sosial (Wilson, 2013: 367), yang memungkinkan tercipta dan terbentuknya sebuah ruang. Bertolak dari perspektif Lefebvre, tentu terbentuknya ruang perumahan-

perumahan muslim di Yogyakarta ini terikat dan tak bisa dilepaskan dari realitas sosial-politik-ekonomi yang melingkupinya, terutama gelombang islamisasi dan kebangkitan Islam (*islamic revival*) dalam panggung sejarah Indonesia moderen, terutama pada tahun 1970-1980an hingga berlanjut dan memuncak pada tahun-tahun berikutnya, sampai saat ini.

Dalam konteks politik pasca Orde Baru, banyak pihak menilai ekspansi kelompok Islam politik dalam lansekap politik Indonesia memang sedang kuat-kuatnya. Kelompok Islam politik ini memandang Islam tidak sekedar agama, melainkan sebagai ideologi politik atau sistem yang komprehensif dan ideal untuk diterapkan dalam segala aspek kehidupan—baik itu ekonomi, politik, sosial, seni dan lain sebagainya. Dalam pandangan keagamaan, mereka begitu menekankan semangat untuk menghindari “pencemaran” Islam dari bentuk budaya-budaya lokal. Maklum, jika mereka hendak merekonstruksi masyarakat Islam yang ditandai oleh ketaatan yang sangat tinggi pada syariah dan pemahaman keagamaan yang berorientasi pada purifikasi atau permurnian Islam. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, mereka memandang negara perlu direbut (Roy, 1994: 24). Negara Indonesia saat ini dipandang sebagai negara yang masih sekuler, dan perlu diperjuangkan untuk menjadi negara Islam. Hanya dengan

merubah Indonesia menjadi negara Islam, islamisasi di masyarakat akan bisa dilakukan secara total (*kaffah*). Kelompok Islam politik ini mewujudkan dirinya ke dalam banyak strategi dan cara (Hasan, 2008: 18).

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kelompok Islam politik dengan semangat puritanisme ini, terus melakukan penetrasi dan ekspansi tiada henti menyebarkan pengaruhnya, mulai dari upaya memperebutkan “ruang” negara sampai ke “ruang-ruang keseharian” seperti mesjid-mesjid terutama di kampus, perkantoran dan lain sebagainya. Bahkan, perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta sebagai ruang (sosial), juga ditemukan banyak direbut dan dibangun oleh orang-orang yang menjadi bagian dari kelompok ini. Penguasaan ruang yang dilakukan kelompok Islam politik di titik sentrum eksistensi kelas menengah tersebut menandai bahwa kelas menengah muslim banyak terinfiltrasi dan menjadi bagian dari kelompok Islam politik. Kelas menengah muslim, pada gilirannya, kemudian menjadi semacam “agen propagandis” Islam politik yang mempengaruhi praktik-praktik sosial dan praktik-praktik meruang mereka sehari-hari. Inilah kiranya *praktik spasial* (yang dalam konsepsi Lefebvre tak dibedakan dengan praktik-praktik sosial), yang memungkinkan terbentuk dan merebaknya perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta sebagai ruang

(sosial). Terbukti, penelitian ini menemukan pengembang perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta memiliki afiliasi dan persekongkolan “ideologis” dengan kelompok Islam politik dan puritanisme Islam (mengenai bentuk-bentuk relasi dan kepentingan ekonomi-politik pengembang dan elit kelompok Islam tersebut, lebih jauh akan dibahas di bagian berikutnya).

Menurut Lefebvre, *representasi ruang* merupakan ruang normatif, ruang ideal, ruang konseptual yang dirumuskan oleh para arsitek, pengembang, teknokrat, ahli planologi dan para profesional yang lainnya. Ruang abstraksi ini dalam pikiran para ahli dan profesional tersebut hanya mungkin dikonkritkan melalui sistem representasi dan tanda-tanda yang spesifik (Lefebvre, 1991: 38-39). Dalam konteks perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta, *representasi ruang*, dapat dilihat dari *site plan*, fasilitas-fasilitas yang ditawarkan kepada konsumen, pola-pola bangunan, konsep perumahan dan lain sebagainya. Selain itu, juga dapat dilihat dari rencana objektif dan paradigma yang digunakan oleh para ahli dan profesional tersebut (Merrifield, 2006: 109).

Bertolak dari konsepsi *representasi ruang* seperti dikemukakan Lefebvre di atas, perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta, terutama yang diteliti dalam penelitian ini yakni perumahan Muslim Darussalam 1 dan 2, perumahan Muslim

Gapura Sitimulya Estate, dan perumahan Muslim Darussalam 3, bisa dipandang tak memiliki konsep yang sepenuhnya jelas. Perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta hanya ditandai oleh tiga hal berikut ini: perumahan tersebut dilabeli sebagai “perumahan muslim”, peruntukannya khusus untuk muslim (beragama Islam), dan keberadaan mesjid begitu diutamakan. Konsep perumahan muslim di Yogyakarta yang dirumuskan oleh pengembang dan konseptor hanya terbatas pada tiga hal itu saja.

Dari ketiga perumahan muslim di Yogyakarta di atas, terlihat pengembang dan konseptor tidak banyak mengeksplorasi obyek bangunan sesuai dengan pola-pola yang khas bangunan dalam arsitektur Islam, baik dari sisi “wajah” bangunan, seperti *facade*, atau dari sisi “kulit” bangunan, seperti struktur dan ornamen-ornamen dan lain sebagainya. Penataan interior perumahan yang dianggap sesuai dengan syariah Islam juga tidak banyak dilakukan oleh pengembang dan konseptor. Dengan demikian, perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta, secara obyek bangunan, relatif tak berbeda dengan perumahan-perumahan umum yang lainnya. Seandainya tak ada label perumahan muslim yang terpampang dengan begitu tegas di muka pintu masuk perumahan, maka cukup sulit untuk menentukan dan membedakan perumahan muslim dengan perumahan biasa pada

umumnya di Yogyakarta. Pada penilaian tertentu, pengembang dan konseptor dalam memproduksi perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta tampak mengambil, mengadopsi dan menerapkan semangat arsitektur moderen yang menekankan pada prinsip-prinsip minimalis dan efisiensi dalam membangun ruang (Ikhwanuddin, 2005: 14). Terbukti, perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta berukuran minimalis, tidak terlalu menekankan struktur dan ornamen, seperti kredo gerakan arsitektur moderen yang terkenal "*form (ever) follows function*", sehingga perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta tampak begitu monoton, kering, kosong, membosankan karena hanya menyerupai kotak-kotak yang berdempetan, dan pada akhirnya, tak bertanggung jawab karena memberikan arsitektur "beban keagamaan" yang tak memiliki kepedulian pada *the others* (liyan) di dalam konteks masyarakat Yogyakarta yang majemuk: persyaratan warga yang hendak membeli dan menghuni, harus muslim!

Ruang representasional merupakan ruang yang secara langsung ditempati dan ditinggali oleh warga dan penggunanya (Lefebvre, 1991: 38-39). Di dalam *ruang representasional* ini, kata Lefebvre, segala bentuk konseptualisasi dalam *representasi ruang* yang dirumuskan oleh sejumlah ahli dan profesional, dengan sendirinya akan menimbulkan sebuah perilaku-perilaku

sosial, tindakan-tindakan, hasrat, dan ritual-ritual tertentu yang khas dari sejumlah warga yang hidup dan tinggal di dalamnya. Perilaku-perilaku sosial tersebut akan selalu sejalan dengan konseptualisasi dalam *representasi ruang*. Sebab, lanjut Lefebvre, dalam *ruang representasi* ini, kita memang akan melihat semacam pewujudan simbolisme yang kompleks. Dengan kata lain, jika *representasi ruang* dianggap sebagai "ruang yang sebenarnya", maka *representasi ruang* benar-benar menghasilkan "kebenaran ruang". *Ruang representasional* terkait dengan bagaimana orang-orang memaknai *representasi ruang* yang dirumuskan (Elden, 2004: 190).

Representasi ruang perumahan Muslim Darussalam 1 dan 2 yang dirumuskan konseptor dan pengembang benar-benar menghasilkan semacam "kebenaran ruang". Warga perumahan muslim memaknai diri mereka berada dalam ruang-ruang yang islami. Dalam keseharian, mereka berorientasi pada kehidupan yang islami dan syar'i. Pemahaman dan praktik keberislaman warga di perumahan muslim ini cenderung puritan. Islam yang mereka tuju adalah keberislaman yang "murni". Selain itu, anak-anak di perumahan muslim juga banyak yang disekolahkan di sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Mereka juga oleh kedua orangtua mereka, dibiasakan untuk ikut sholat berjamaah lima waktu dan mengaji di mesjid. Sementara, anak-anak perempuan didorong dan dibiasakan untuk

memakai jilbab dalam keseharian. Meskipun masih ada sejumlah perempuan di perumahan Muslim Darussalam 1 dan 2 yang tidak mengenakan jilbab dan mengenakan pakaian yang dianggap kurang pantas, beberapa warga yang “lebih sadar” terus berupaya mengingatkan dan berusaha mendorong ke arah cita-cita awal yaitu terbentuknya komunitas dan lingkungan yang islami dan syari’ (sesuai syariah Islam). Di dalam perumahan muslim, warga semuanya beragama Islam. Warga non-muslim dieksklusi dan dipinggirkan dari ruang perumahan-perumahan muslim. Dari pembahasan mengenai *ruang representasional* perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta tersebut di atas, penelitian ini menegaskan apa yang dikatakan oleh Lefebvre bahwa pasti selalu ada semacam ‘kekerasan’ intrinsik dalam setiap “abstraksi” atau rekayasa spasial: sebab kata Lefebvre, semua “rencana” yang dirumuskan oleh pengembang dan konseptor itu tak akan hanya berhenti di atas kertas, “buldozer” (dan segala bentuk otoritas yang lain) akan merealisasikan “rencana” tersebut (Charnock dan Fumas, 2011: 12). *Representasi ruang* perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta sebagaimana dirumuskan oleh pengembang dan konseptor betul-betul menjadi alat untuk kepentingan kontrol dan dominasi. Kekerasan intrinsik itu berupa “pemaksaan” pada satu nilai keagamaan (keislaman) tertentu dan praktik eksklusi warga non-

muslim dari ruang perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta.

Analisis Kajian

1. Relasi dan Kepentingan Ekonomi Politik Dibalik Produksi Perumahan-perumahan Muslim di Yogyakarta

Perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta sebagai ruang (sosial), meski di sisi permukaan, menunjukkan gejala kebangkitan islam politik dan islamisasi yang bercorak puritan, namun dalam perspektif Lefebvre, perumahan-perumahan muslim tersebut tak bisa dilepaskan sepenuhnya dari semangat kapitalisme dalam menaklukkan ruang-ruang untuk kepentingan akumulasi modal semata (Ronneberger dalam Goonewardena, 2008: 136; Sangaji, 2011). Sehingga penguatan Islam politik dan islamisasi kontemporer, yang mengambil bentuk dalam wujud ruang perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta tersebut, tak lebih hanya sebentar *epifonema* (efek samping) semata.

Oleh sebab itu, untuk dapat menjelaskan fenomena perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta ini jauh ke jantung akarnya, harus ditempatkan dalam posisi semangat kritik Lefebvre terhadap kapitalisme itu sendiri, terutama kritik terhadap *representasi ruang* dan ruang abstrak di bawah kapitalisme yang bergandengan dengan kekuatan Islam politik dan

puritanisme Islam. Hubungan antara keduanya, sebenarnya tak terlalu mengagetkan, sebab jauh-jauh hari, Maxim Rodinson (dalam Hefner, 1998: 244) sudah mensinyalir kompatibilitas Islam dengan ekonomi moderen. Menurut Rodinson, tak ada hal yang secara fundamental menghalangi masyarakat muslim untuk menerapkan kapitalisme.

Bertolak dari penjelasan di atas, perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta juga mesti dibaca sebagai bagian dari soal ekonomi politik. Bukan semata-mata persoalan yang bersifat sakral (keagamaan), tetapi juga persoalan yang lebih profan seperti adanya “kepentingan-kepentingan material”, yang ternyata, keduanya memang terbukti saling berkelindan di dalamnya.

2. Studi Kasus 1: Konteks Perumahan Muslim Darussalam 1,2, dan 3

Perumahan Muslim Darussalam 1 dan 2 diproduksi oleh pengembang PT Sarwo Indah. Namun, pengembang hanya sekedar membangun. Konsep awal perumahan Muslim Darussalam 1 dan 2 ini sepenuhnya dirancang dan dirumuskan oleh tiga orang di luar PT Sarwo Indah yakni, Mansur Fahmi, Agus Prayitno dan Nur Salim sebagai konseptor. Ketiganya adalah seorang pegawai negeri, kecuali Nur Salim yang berprofesi di bidang swasta. Mereka memiliki komitmen keberislaman yang

tinggi karena sama-sama aktifis *tarbiyah* di mesjid kampus. Mulanya, ketiga orang ini memang sama-sama menginginkan dan sepakat untuk membuat perumahan muslim di Yogyakarta. Setelah berkali-kali bertemu, berdiskusi dan menyusun konsep, mereka kemudian mencari cara bagaimana merealisasikan perumahan muslim yang mereka telah bayangkan tersebut. Mereka bertiga lantas mulai mencoba membangun relasi kerja dengan pengembang (*developer*) perumahan. Untuk memberikan semacam jaminan dan kepastian kepada pengembang, ketiga konseptor terlebih dahulu mengumpulkan calon pembeli. Ketiga konseptor menyebar sendiri brosur promosi perumahan muslim yang mereka buat. Sebagian besar disebar ke kolega-kolega mereka sendiri, baik di kantor maupun kolega-kolega lain yang mereka kenal.

Tak sia-sia, ketiga konseptor itu mampu mengumpulkan sekitar 50 sampai 60-an orang calon pembeli awal. Puluhan calon pembeli awal itu, tentu sangat penting, karena membuat posisi tawar konseptor semakin kuat dalam relasinya dengan pengembang. Tentu bagi pengembang, keberadaan puluhan calon pembeli awal perumahan muslim yang akan mereka garap itu, selain memberikan kepastian dan jaminan perumahan muslim sebagai komoditas properti laris dan terbeli, juga mampu menekan biaya produksi (terutama biaya untuk promosi) yang harus

dikeluarkan pihak pengembang. Artinya, biaya produksi semakin berkurang. Jelas, ini merupakan keuntungan tersendiri bagi pengembang. Berbeda ketika halnya pengembang, misalnya, sejak dari awal membangun perumahan muslim dan mencari calon pembeli sendiri. Barangkali, biaya promosi akan lebih membengkak hanya untuk mendapatkan pembeli.

Dari sini terlihat tegas, bentuk relasi antara pengembang dan ketiga konseptor perumahan Muslim Darussalam 1 dan 2, adalah relasi yang bersifat transaksional dan bisnis. Pengembang sepenuhnya berorientasi bisnis, melakukan penumpukan modal sebesar-besarnya dengan cara “menjual” agama (Islam) melalui produk perumahan-perumahan muslim. Apalagi mengingat, kelas menengah muslim sebagai konsumen yang disasar, sedang tinggi-tingginya semangat keberislamannya. Mereka cenderung gila “belanja agama”. Tak ada semangat dakwah dalam bisnis properti dari sisi pengembang. Sebaliknya, konseptor perumahan Muslim Darussalam 1 dan 2 memang memiliki semangat dan muatan dakwah dalam memproduksi perumahan muslim di Yogyakarta. Mereka memandang produksi perumahan muslim bagian dari “kerja dakwah agama” di bidang properti. Meski demikian, tetap hubungan konseptor dengan pengembang yang berorientasi bisnis memberikan keuntungan material tersendiri bagi ketiga konseptor. Konseptor

menjadi bagian dari proses pencarian dan penumpukan modal dengan cara memboncengi “dakwah agama” melalui bisnis properti. Yang cukup menarik, setelah pembangunan perumahan Muslim Darussalam 1 dan 2 ini dianggap sukses dan mendatangkan keuntungan yang besar oleh pengembang, PT Sarwo Indah kemudian membangun perumahan muslim kembali di daerah lain: perumahan Muslim Darussalam 3 yang terletak di Jetis, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Tidak jauh dari kampus Ekonomi UII di Condongcatur. Namun, dalam pemroduksian perumahan Muslim Darussalam 3 ini, pengembang tak melibatkan lagi ketiga konseptor perumahan Muslim Darussalam 1 dan 2. Ini dilakukan tentu karena pengembang melihat perumahan muslim cukup prospek di Yogyakarta.

3. Studi Kasus 2: Konteks Perumahan Muslim Gapura Sitimulya Estate

Perumahan Muslim Gapura Sitimulya Estate diproduksi oleh pengembang PT Gapura Puri Raya. PT Gapura Puri Raya merupakan pengembang properti yang berkantor pusat di Jepara, Jawa Tengah. Namun, memiliki kantor cabang di Yogyakarta yang dipimpin oleh Gusta Dwipayana. PT Gapura Puri Raya sendiri diakui oleh Gusta Dwipayana sebagai perusahaan keluarga. Perumahan Muslim Gapura Sitimulya Estate mulanya dibangun tidak sebagai perumahan muslim.

Melainkan, perumahan biasa dan tak menggunakan label “perumahan muslim”. Namun, sejak pengembang mendapatkan empat pembeli awal, perumahan ini kemudian mulai dirubah menjadi perumahan muslim. Menurut pengakuan pengembang, perubahan dari perumahan biasa (tanpa label “perumahan muslim”) ke perumahan muslim ini didasari karena keinginan pribadinya untuk memiliki sebuah komunitas muslim. Keinginan pengembang untuk memiliki komunitas islam itu berasal dari pengajian-pengajian agama. Pengembang memang mengaku mulai kerap mengikuti dan menghadiri pengajian-pengajian agama, terutama dari kelompok-kelompok Islam politik dan puritanisme Islam. Bahkan, ke depan, pengembang mulai bercita-cita untuk menjadi da’i (pendakwah, seperti ustadz). Pekerjaan sebagai pengusaha, sebagai pengembang (*developer*) di bisnis properti, yang dilakukannya saat ini, hanya *pekerjaan antara* dan juga dipandang sebagai bagian dari “kerja dakwah agama”.

Jika dalam kasus perumahan Muslim Darussalam 1, 2 dan 3, relasi antar konseptor dengan pengembang bersifat transaksional dan bisnis. Pengembang murni berorientasi bisnis dan akumulasi modal semata, serta hanya konseptor yang memiliki muatan dakwah Islam. Dalam konteks perumahan Muslim Gapura Sitimulya Estate, tak demikian halnya yang terjadi. Pengembang perumahan Muslim

Gapura Sitimulya Estate memiliki hubungan “ideologis” dengan kelompok-kelompok Islam politik dan puritanisme Islam, karena seringkali pengembang dan keluarganya mengikuti pengajian-pengajian agama yang diadakan oleh kelompok-kelompok tersebut di sejumlah tempat di Yogyakarta. Tentu sebagai pengembang, Gusta juga melihat perubahan ke perumahan muslim itu karena pertimbangan penggunaan label “perumahan muslim” dan khusus untuk muslim dianggap jauh lebih prospektif secara bisnis, mengingat jumlah kelas menengah muslim di Yogyakarta relatif masih besar. Yang menarik, sekalipun pengembang memandang produksi perumahan muslim sebagai bagian dari “kerja dakwah agama”, pengembang tetap memiliki orientasi penumpukan modal dan “laba kapitalis” dibawah sistem yang dituding kapitalistik dengan cara-cara yang vulgar dan tak etis, menabrak aturan-aturan dan pedoman agamanya sendiri. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana pengembang cenderung menutup mata dan tak terlalu mepedulikan praktik-praktik suap yang biasa terjadi saat melakukan dan mengajukan proses perizinan untuk membangun perumahan, mulai dari pembebasan lahan, Izin Membangun Bangunan (IMB) dan lain sebagainya yang terkenal rumit dan susah.

Kesimpulan

Melihat kemunculan dan merebaknya perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta yang dapat mengakibatkan segregasi sosial dan pendangkalan relasi sosial antar kelompok keagamaan di Yogyakarta yang dikenal sebagai kota yang majemuk dan plural, sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian di atas, semestinya pemerintah daerah memiliki perhatian serius dalam hal ini dengan merumuskan kebijakan tata ruang dan politik perumahan yang bermuatan visi inklusif.

Namun kenyataannya, pemerintah daerah di Yogyakarta, sampai penelitian ini ditulis, nampaknya tidak memiliki *“grand scenario”* dalam politik perumahan dan tata ruang yang bermuatan visi inklusif. Dalam konteks pembangunan perumahan, mereka hanya menyandarkan pada hal-hal yang pragmatis dan prosedur perizinan yang bersifat teknis, yang hanya menunjukkan dengan tegas bahwa mereka sama sekali tidak mempertimbangkan nilai dan semangat mengelola keberagaman dalam praktik kebijakan. Sehingga wajar jika kemudian muncul kekhawatiran atas *“ruh”* keistimewaan Yogyakarta—terutama terkait masalah tata ruang sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 2012 pasal 34 dan 35—lenyap dan kehilangan kebermaknaannya.

Daftar Pustaka

- Assyaukanie, Luthfi. 2009. *“Islam and the Secular State”*. Institute of Southeast Asian Studies: Singapore.
- Afandi, Arief dkk. 1997. *“Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gusdur dan Amien Rais”*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Barker, Chris. 2008. *“Cultural Studies: Teori dan Praktik”*. Kreasi Wacana: Yogyakarta.
- Baso, Ahmad. 2002. *“Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam”*. The Asia Foundation dan Desantara: Jakarta.
- Bruinessen, Van Martin. 1994. *“NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Warna Baru”*. LKIS dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- _____. 1998. *“Rakyat Kecil, Islam dan Politik”*. Benteng Budaya: Yogyakarta
- _____. 2013. *“Rakyat Kecil, Islam dan Politik”*. Gading: Yogyakarta.
- Elden, Stuart. 2004. *“Understanding Henri Lefebvre”*. Continuum: London dan New York.
- Goonewardena, Kanishka, dkk. 2008. *“Space, Difference, Everyday Life: Reading Henry Lefebvre”*. Routledge: New York dan London.
- Hasbullah, Moeflich. 2012. *“Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia”*. Penerbit Pustaka Setia: Bandung.
- Hasan, Noorhaidi. 2008. *“Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas Pasca-Orde Baru”*. LP3ES dan KITLV: Jakarta.
- Hasan, dkk. 2011. *“Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia”*. CSRC UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Hefner, Robert. 2000. *“Civic Islam: Muslim and Democratization in Indonesia”*. Princeton University Press: New Jersey.
- Hefner, W Robert, dkk. 1998. *“Markets Culture: Society and Morality in The New Asian Capitalism”*. Westview Press: United State America.
- Husaini, Adian. 1995. *“Habibie, Soeharto dan Islam”*. Gema Insani Press: Jakarta.

- Kansil, CST. 1989. *"Paket Kebijakan Deregulasi 1988"*. Karya sastra Tridarma: Jakarta.
- Kunio, Yoshihara. 1990. *"Kapitalisme Semu Asia Tenggara"*. LP3ES: Jakarta.
- Kitiarsa, Pattana. 2008. *"Religious Commodifications in Asia: Marketing Gods"*. Routledge: London dan New York.
- Latif, Yudi. 2007. *"Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis Atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia"*. Jelasutera: Yogyakarta dan Bandung.
- Lefebvre, Henri. 1991. *"The Production of Space"*, translated by Donald Nicholson-Smith. Blackwell Publishing: Australia.
- Liddle, R William. 1997. *"Islam, Politik dan Modernisasi"*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Maliki, Zainuddin. 2010. *"Sosiologi Politik, Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik"*. UGM Press: Yogyakarta.
- Merrifield, Andy. 2006. *"Henri Lefebvre: A Critical Production"*. Routledge: New York dan London.
- Rieklefs, M.C. 2014. *"Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang"*. Serambi: Jakarta.
- Roy, Oliver. 1994. *"The Failure of Political Islam"*. Harvard University Press: Cambridge.
- Turmudi, Endang. 2014. *"Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Sosiologi: Dinamika Islamisme dalam Perkembangan Masyarakat Indonesia Modern"*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): Jakarta.
- Lasman, Diah K. 2007. *"Representasi Identitas dalam Brosur dan Artikel Perumahan Muslim"*, P.S Prancis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, diakses dari laman resmi staf pengajar UI <http://staff.ui.ac.id/user/343/publications>.
- Liddle, William. 1996. *"The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation"*. The Journal of Asian Studies, No 3 Volume 55.
- Schmidt, Leoni. 2012. *"Urban Islamic Spectacles Transforming the Space of the Shopping Mall During Ramadhan in Indonesia"*, Jurnal Inter-Asia Cultural Studies, Volume 13, Number 3.

Sumber Internet:

- Anto Sangaji, *"Kapitalisme dan Produksi Ruang"*. Diakses dari <http://indoprogress.com/2011/02/kapitalisme-dan-produksi-ruang/>
- Faqih, Farabi, *"Rumah Indonesia Indah"*, diakses dari <http://www.karbonjournal.org/focus/rumah-indonesia-indah>
- Robertus Robet. *"Ruang Sebagai Produksi Sosial dalam Henri Lefebvre"*. Diakses dari <https://caktarno.wordpress.com/2014/09/06/ruang-sebagai-produksi-sosial-dalam-Henri-Lefebvre/>

Jurnal:

- Charnock, Greig dan Riberra-Fumas, Ramon. 2011. *"A New Space for Knowledge and People? Henri Lefebvre, Representations of Space, and the Production of '22@Barcelona'"*. Jurnal Environment and Planning D (EPD): Society and Space, Volume 29 (4).
- Japhy Wilson, *"The Devasting Conquest of The Lived by the Conceived": The Concept of Abstract Space in the*